

SINOPSIS

Timah sejatinya tidak terlepas dari Pulau Bangka, karena timah merupakan komoditi utama setelah lada yang menyumbangkan devisa bagi negara maupun daerah. Banyaknya pertambangan-pertambangan yang dikelola oleh rakyat ternyata membawa dampak yang kurang baik. Dari permasalahan diatas oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul *"Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Dalam Optimalisasi Pengawasan Pertambangan Timah Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2008 "*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif, unit analisa dilakukan pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. Sumber data penulis dapatkan dari kantor Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, kantor BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah, arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Dari penelitian ini peneliti dapat mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Dalam Pengawasan Pertambangan Timah Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2008, yaitu: memberiakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertambangan dan lingkungan hidup, dilakukannya penertiban pertambangan timah yang dilakukan oleh Tim PETI(Tim Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin), adanya PIT (Pelaksana Inspkesi Tambang) keperusahaan-perusahaan tambang yang mempunyai izin, serta mengikutsertakan masyarakat dalam hal pelaporan-pelaporan mengenai pertambangan. Selain itu juga dari penelitian ini, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan pertambangan timah tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung dalam pengawasan pertambangan timah yaitu: adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan yaitu Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan serta Perda No.8 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan pertambangan umum, adanya anggaran/dana yang disediakan pemerintah daerah, adanya Tim PETI, serta adanya dorongan dari DPRD dan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pertambangan timah yaitu: sumber daya aparatur pemerintah masih kurang, belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang pertambangan, serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pertambangan masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yaitu: lebih dioptimalkannya pengawasan mengenai pertambangan, setelah mengikuti penyuluhan agar masyarakat dapat mengamalkan secara baik pengetahuan yang telah didapatkan, pengkoordinasian dalam melakukan operasi Tim PETI lebih efektif lagi, memberi sanksi yang lebih tegas bagi para penambang yang melanggar, membuka lowongan melalui CPNS dibidang pertambangan, bekerjasama dengan universitas-universitas yang mempunyai jurusan pertambangan agar mendapatkan sarana yang berkualitas